

ISSN 2580 6378
E-ISSN 2580 7048



JURNAL
ASIA
PACIFIC
STUDIES

Journal of International Relations Study Program
Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Kristen Indonesia

Volume 5 | Number 2 | July - December 2021

MENELAAH PERANG BARU DI ASIA TENGGARA BERDASARKAN STUDI KASUS KONFLIK ROHINGYA

Jianly Imanuel Bagensa

Paramadina Graduate School of Diplomacy, Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadina, Jl. Gatot Subroto No. Kav. 97, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12790, Indonesia

jianlybagensa@gmail.com

Abstract

The end of the cold war brought a new chapter to the conflict in different parts of the world. Warfare developed with a new concept, which initially conventional developed into modern, the impact of the rapid process of globalization. In the context of the new war, warfare involves more and more actors, not only state and non-state but also a combination of actors based on political interests rather than ideology. Southeast Asia is one of the regions in the world that has also never been separated from conflicts, one of which is the Rohingya conflict, an ethnic conflict that develops in Myanmar. The development of the Rohingya conflict is described as one example of the development of a new war perspective in Southeast Asia. The study of the new war is the first step in mapping conflicts in Southeast Asia, especially the Rohingya conflict as a case study adopted in this research. This study aims to show the existence of a perspective in explaining various conflict problems that occur today. The analysis will be carried out using a new war theory approach developed by Mary Kaldor as the main discussion in describing the existence of new wars that have occurred in several regions and countries in the world in the era of globalization, including in Southeast Asia and Myanmar. The discussion is carried out by exploring the history of the conflict, efforts to resolve the conflict, the role of the parties to the conflict, the internationalization of conflict issues, and the analysis of the Rohingya conflict based on the perspective of the new war itself.

Keywords: New war, Mary Kaldor, Rohingya conflict, Myanmar, Southeast Asia.

Abstrak

Berakhirnya perang dingin membawa babak baru bagi konflik di berbagai belahan dunia. Peperangan berkembang dengan konsep baru, yang awalnya konvensional berkembang menjadi moderen, dampak dari pesatnya proses globalisasi. Dalam konteks perang baru, peperangan melibatkan semakin banyak aktor, bukan hanya negara dan non negara tetapi juga kombinasi antar aktor yang berdasar pada kepentingan politik dari pada ideologi. Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan di dunia yang juga tidak pernah lepas dari konflik, salah satunya adalah konflik Rohingya, konflik etnis yang berkembang di Myanmar. Perkembangan konflik Rohingya digambarkan sebagai salah satu contoh perkembangan perspektif perang baru di Asia Tenggara. Penelaahan perang baru merupakan langkah awal pemetaan konflik di Asia tenggara, khususnya konflik Rohingya sebagai studi kasus yang diangkat pada penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan eksistensi sebuah perspektif dalam menjelaskan berbagai masalah konflik yang terjadi saat ini. Analisis akan dilakukan menggunakan pendekatan teori perang baru yang dikembangkan oleh Mary Kaldor sebagai pengantar bahasan utama dalam menggambarkan keberadaan perang baru yang terjadi di beberapa kawasan dan negara di dunia pada era globalisasi, termasuk di Asia Tenggara dan Myanmar. Pembahasan dilakukan dengan mengupas sejarah konflik, upaya penyelesaian konflik, peran para pihak dalam konflik, internasionalisasi isu konflik, serta analisis konflik Rohingya berdasarkan perspektif perang baru itu sendiri.

Kata kunci: Perang baru, Mary Kaldor, konflik Rohingya, Myanmar, Asia Tenggara.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam konteks peradaban manusia, perang dan konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan peradaban itu sendiri. Plato bahkan menegaskan bahwa ketika semua orang binasa, perang dan konflik akan berakhir (Muradi, 2010). Ibn Khaldun dalam buku Mukadimah, menyatakan bahwa Tuhan menciptakan perang dan konflik telah terjadi sejak dunia diciptakan. Ibn Khaldun juga menulis bahwa ada dua aspek yang berbeda dalam perang karena ketidakadilan dan perang suci. Khaldun menjelaskan bahwa ada empat jenis perang, yaitu: Pertama, perang setara, biasanya antar suku atau dalam ruang lingkup keluarga. Kedua, perang yang disebabkan oleh permusuhan, seperti komunitas Muslim dan Yahudi Israel. Ketiga, perang suci, seperti antara Islam dan Kristen, antara Protestan dan Katolik. Keempat, perang dinasti, seperti Kerajaan Nepal dan pemberontakan Maois (Freedman, Lawrence (ed), 1994).

Berakhirnya Perang Dingin membawa perubahan dalam tatanan internasional. Setelah berakhirnya Perang Dingin, lingkungan strategis baru untuk mengembangkan kemampuan perang yang tidak konvensional telah berubah. Perkembangan kemampuan perang inkonvensional telah membentuk metode dan strategi perang baru, dan interaksi nasional menjadi semakin kabur (Poetri, 2021). Dengan runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin, banyak pihak berharap era perdamaian akan datang. Beberapa pakar ilmu sosial bahkan percaya bahwa sejarah berakhir dengan berakhirnya Perang Dingin. Sejarah berakhir dengan kemenangan demokrasi dan liberalisme. Para pemimpin dunia memimpikan tatanan dunia baru yang sejahtera dan damai. Tatanan dunia baru ini akan mencegah berbagai bentuk perang, secara fleksibel menanggapi berbagai bencana alam, secara aktif mempromosikan alokasi sumber daya, dan memajukan kemakmuran seluruh bangsa (Michael E. Brown, 1997).

Semua harapan ini tidak akan pernah menjadi suatu kenyataan yang faktual. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai konflik etnis muncul di dunia, yang melibatkan berbagai kepentingan politik dan ekonomi. Di beberapa konflik, skala kekerasannya begitu besar bahkan bisa disebut genosida. Banyak orang dikejutkan oleh luas dan dalamnya konflik. Perang Bosnia-Herzegovina 1999 menimbulkan keprihatinan dan simpati yang meluas dari semua negara di dunia. Konflik lainnya, seperti Afghanistan, Angola, Armenia, Azerbaijan, Myanmar, Georgia, India, Indonesia, Liberia, Sri Lanka, Sudan, Tajikistan, Bangladesh, Belgia, Bhutan, Burundi, Estonia, Ethiopia, Guatemala, Irak, Latvia, Lebanon, Mali, Moldova, Niger, Irlandia Utara, Pakistan, Filipina, Rumania, Rwanda, Afrika Selatan, Spanyol, dan Turki juga memiliki skala besar yang tidak dapat diabaikan. Konflik politik di Tibet, Cina dan Rusia juga tampaknya bersiap untuk konflik berdarah (Michael E. Brown, 1997).

Sistem internasional saat ini sedang mengalami perubahan besar. Transformasi ini terbentuk setelah Perang Dingin. Menyebarnya globalisasi dan munculnya mode baru kerjasama dan konflik antara aktor negara dan aktor non-negara telah memicu berkembangnya generasi baru peperangan. Metode peperangan baru ini memiliki bentuk peperangan yang dicirikan oleh berbagai kombinasi jaringan negara dan non-negara yang berperang atas nama politik identitas daripada ideologi. Inilah yang disebut perang baru atau *new war* di abad ke 21. Globalisasi telah mempengaruhi munculnya perang-perang baru yang membawa kemajuan di bidang informasi, teknologi, dan komunikasi. Globalisasi memiliki kecenderungan untuk mempengaruhi perubahan sifat konflik kekerasan, karena mengarah pada melemahnya kedaulatan nasional di

wilayahnya melalui mobilisasi politik aktor internal dan eksternal berdasarkan politik identitas. Perang baru sering ditandai dengan kekerasan terhadap warga sipil. Oleh karena itu, globalisasi sangat mungkin untuk mengantarkan era perang baru (UKEssays., 2018).

Mary Kaldor memperkenalkan konsep perang baru yang logikanya berbeda dengan perang lama. Para peserta perang lama (perang konvensional) terdiri dari angkatan bersenjata reguler suatu negara. Perang baru terdiri dari berbagai kombinasi aktor negara dan non-negara, seperti tentara reguler, komite militer swasta atau tentara bayaran, jihadis, panglima perang, dan organisasi paramiliter. Dilihat dari tujuannya, tujuan perang lama adalah geopolitik atau ideologi (demokrasi atau sosialisme). Ada pandangan bahwa perang baru didorong oleh motif ekonomi, tetapi sulit untuk membedakan mereka yang menggunakan kekerasan politik atau kegiatan ekonomi untuk mendanai masalah politik karena alasan ekonomi. Pada saat yang sama, sistem ekonomi perang lama terpusat, mandiri, dan memobilisasi penduduk. Perang baru adalah bagian dari globalisasi, ekonomi terdesentralisasi, partisipasi penduduk rendah dan berorientasi pada keuntungan, yang tergantung pada kelanjutan kekerasan (Kaldor, 2013).

Perang baru seringkali lebih ganas dan menakutkan daripada perang gaya lama, dan perang gaya lama yang biasanya membatasi perang konvensional antar negara telah dibatalkan. Praktek-praktik seperti penculikan, penyiksaan, pemerkosaan sistematis dan pembunuhan tanpa pandang bulu berasal dari ranjau-ranjau, bom mobil, dan serangan bunuh diri telah menjadi ciri umum peperangan modern. Oleh karena itu, semua orang dari ras atau budaya tertentu dapat didefinisikan sebagai "musuh" karena mereka secara inheren dianggap tidak berharga atau jahat, dan tujuan militer dan sipil sama-sama sah (Andrew Heywood, Politik, (Terjemahan: Ahmad Lintang Lazuardi), 2014). Strategi perang telah diubah menjadi strategi perang baru dalam mengejar penargetan yang disengaja dan pemindahan paksa warga sipil. Dampak perang baru ini bahkan lebih merusak daripada perang lintas batas tradisional. Perang baru telah menyerang inti struktur sosial suatu negara dan mengancam perkembangan politik dan ekonominya.

Perang ini baik melalui pembersihan etnis, atau melalui penggunaan kekuatan untuk mengusir penduduk, atau melalui pembunuhan sistematis terhadap orang-orang dengan pandangan dan identitas politik, agama atau etnis yang berbeda (Malantowicz, 2013). Perubahan esensi perang semacam ini, di satu sisi memang kondusif bagi perkembangan politik suatu negara atau wilayah, tetapi di sisi lain eskalasi konflik yang sifatnya terlokalisir ternyata mengarah kepada kekelan dari perang itu sendiri. Konflik telah menyebar hampir merata ke semua negara. Bahkan konflik telah menggantikan perang yang sebenarnya. Tak heran jika perang antara Israel dan Hizbullah, misalnya, disebut sebagai konflik bersenjata, bukan perang antara Israel dan Hizbullah. Atau, misalnya, perang antara Ethiopia dan Eritria disebut konflik di Tanduk Afrika. Konflik bernuansa etnis pada dasarnya merupakan isu rasial yang berlatar belakang kehidupan politik, yang telah dianggap sebagai masa lalu.

Secara umum, pecahnya konflik etnis ini didorong oleh berbagai kekecewaan jangka panjang di dalam negara-bangsa, sehingga muncul gerakan etnis dan berbagai tuntutan politik, setidaknya untuk mendapatkan perhatian dan otonomi, dan setidaknya untuk mendapatkan perhatian dan otonomi untuk mendirikan sebuah negara berbasis bangsa. Perbedaan suku dan agama merupakan isu yang sangat sensitif, rawan konflik terbuka, bahkan bisa mencapai tingkat kekerasan yang tinggi, menewaskan banyak orang, seperti konflik etnis muslim Rohingya di Myanmar. Etnis Rohingya telah menghadapi diskriminasi sistematis dan pengucilan sejak tahun 1962, Etnis Rohingya merupakan kelompok Muslim terbesar di Myanmar yang berjumlah sekitar satu juta

atau sekitar empat persen dari total penduduknya (IPHRC. Report of The OIC-IPHRC Fact Finding Visit to Rohingya Refugees' Camps in Bangladesh to Assess Human Rights Situation of Rohingya Muslim Minority In Myanmar, 2018). Etnis Rohingnya telah mengalami marjinalisasi sejak lama, mereka ditolak menjadi kewarganegaraan Myanmar dan tidak diakui sebagai kelompok etnis. Penduduk Myanmar berpendapat bahwa Rohingnya berasal dari Bangladesh sementara penduduk Bangladesh pun berpikir bahwa Rohingnya berasal dari Myanmar. Keduanya tidak ingin mengakui bahwa Rohingnya sebagai warga negaranya. PBB menyebut bahwa tentara kemungkinan telah melakukan pembersihan etnis (Nicola Smith dan Charlotte Krol, 2017).

Sebagai akibat dari tragedi kekerasan Buddhis-Muslim ribuan orang tewas, ratusan ribu mengungsi, ribuan rumah diratakan dengan tanah, dan harta benda yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan dan dihancurkan oleh orang-orang yang marah dan marah (DW Indonesia, 2021). Beberapa tahun terakhir tepatnya 2012 terjadi konflik di *Central Rakhine* yang menyebabkan 140.000 orang kebanyakan etnis Rohingnya mengungsi. Selama lebih dari lima tahun 120.000 orang dapat dikembalikan namun dengan tempat tinggal yang kurang layak dan akses kesehatan yang terbatas (European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations Report, Rohingnya Crisis, 2018). Tindakan diskriminasi terhadap warga Rohingnya semakin nampak terlihat dari surat rahasia Myanmar yang disampaikan Aung San Suu Kyi saat bertemu pelapor khusus PBB bocor ke publik. Sebagaimana diberitakan *Reuters*, Suu Kyi dalam pernyataannya kepada pelapor khusus PBB mengatakan pemerintahnya tidak akan menggunakan kata "Rohingya" dan menggantinya dengan "masyarakat penganut Islam di Rakhine" (Paul, 2018). Pemerintah Myanmar tidak mengakui kewarganegaraan Rohingnya yang telah tinggal beberapa generasi di negara itu. Masyarakat Rohingnya menurut pemerintah Myanmar, dianggap sebagai pendatang ilegal dari Bangladesh, sehingga tidak layak dianggap sebagai warga negara.

Komisi Tinggi PBB untuk bidang HAM, Zeid Ra'ad Al Hussein menyatakan bahwa masyarakat Rohingnya telah diperlakukan secara diskriminatif. Mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan bahkan untuk mendapatkan pengobatan saja harus mendapatkan dokumen khusus sebagai pengantar ke rumah sakit. Hal ini berakibat pada tingginya angka kematian bayi karena penanganan terhadap ibu hamil yang seringkali terlambat untuk mendapatkan penanganan medis. (Armandhanu, 2016). Oleh karena itu, jika dilihat dari uraian di atas, peneliti percaya dan setuju bahwa sifat perang telah direduksi menjadi konflik masif, non-parsial, ekspansi non-teritorial, dan non-kolonial. Bahkan dengan bahasa yang lebih sederhana, perang telah memasuki babak baru, dan konflik merupakan manifestasi dari perang itu sendiri. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana memahami perspektif perang baru yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan disertai dengan penelaahan studi kasus yaitu konflik yang dialami oleh etnis Rohingnya di Myanmar.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada tulisan ini maka peneliti mencoba mengangkat rumusan masalah pada penelitian ini yaitu terkait dengan "Bagaimanakah Perspektif Perang Baru di Asia Tenggara dalam Menelaah Konflik Rohingnya di Myanmar?".

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara komperhensif mengenai bentuk perang baru di Asia Tenggara dengan studi kasus pada konflik Rohingnya, yang

diawali dengan pendalaman faktor historis konflik Rohingya, kemudian diikuti dengan menggali informasi pihak-pihak yang terlibat dalam upaya penyelesaian konflik Rohingya, setelah itu mengkaji proses internasionalisasi isu dalam konflik Rohingya, hingga diakhiri dengan analisis konflik Rohingya menggunakan perspektif *New war* dari Mary Kaldor yang dijadikan sebagai landasan dan arah penelitian dari peneliti.

2. Tinjauan Pustaka

Peneliti mencoba melakukan tinjauan pustaka dari Buku “*New and Old wars*” yang diterbitkan Mary Kaldor pada tahun 1999. Buku ini ditulis Kaldor dalam rangka menghadirkan perdebatan akademis terkait perubahan sifat peperangan (*nature of warfare*) di abad ke-21. Perubahan *nature of warfare* ini ditandai dengan kemunculan banyak terminologi baru dalam perang, seperti ‘*wars among the people*’, ‘*hybrid wars*’, ‘*privatised wars*’, dan ‘*post modern wars*’. Namun dalam konteks ini, Kaldor menghadirkan terminologi baru yang disebutnya dengan ‘*new wars*’. Penulisan buku ini sendiri banyak dipengaruhi oleh pengalaman Kaldor sebagai aktivis dan peneliti di Bosnia. Tak heran, Kaldor kemudian menjadikan Bosnia sebagai studi kasus untuk menggambarkan konsep *new wars* yang dicetuskannya.

Kaldor menggambarkan *new wars* sebagai lawan dari *old wars*. Ciri-ciri *old wars* dapat dilihat dari peperangan yang terjadi di Eropa antara akhir abad 18 sampai pertengahan abad 20. Di sana terjadi peperangan antarnegara dengan prajurit berseragam yang saling serang untuk saling mengalahkan (*decisive battles*). Dalam *old wars*, bisa sangat jelas dibedakan antara *public and private*, internal dan eksternal, ekonomi dan politik, sipil dan militer, kombatan dan nonkombatan. Kaldor menyebutkan, “*old wars reached their zenith during the mid-20 century when the application of science and technology enables states to commit destruction on a massive scale – 35 million people were killed in World War One and 50 million in World War Two*” (Kaldor, 1999). Sementara, Kaldor menjelaskan bahwa *new wars* adalah produk dari globalisasi, dan cenderung terjadi di negara lemah – para pihak yang terlibat biasanya gabungan dari beberapa negara dan juga aktor non negara (Kaldor, 1999). Dalam *new wars* sangat sedikit sekali prajurit berseragam serta sedikit pula terjadinya pertempuran yang menentukan.

Sebaliknya, kekerasan cenderung dilakukan oleh gabungan atau kombinasi dari pasukan negara, milisi, tentara bayaran dan pasukan internasional. Berbicara target, *new wars* terjadi ketika target kekerasan lebih banyak menimpa masyarakat sipil, sebagai konsekuensi dari kaburnya perbedaan antara kombatan dan nonkombatan. Dalam *old wars*, 80 persen korban adalah militer atau pasukan bersenjata. Sementara dalam *new wars*, 80 persen korban adalah masyarakat sipil. Selain itu, *new wars* juga merupakan peperangan identitas (*wars of identity rather than ideology*). Berbeda dengan *old wars*, dalam *new wars* sangat sulit dibedakan antara negara dan nonnegara, *public and private*, eksternal dan internal, ekonomi dan politis, bahkan juga sulit dibedakan antara situasi perang dan situasi damai.

Menurut Kaldor, ada empat kategori yang membuat perbedaan antara *new wars* dan *old wars* sangat tampak. Pertama, perbedaan aktor. *Old wars* terjadi antara tentara regular, sementara aktor yang terlibat dalam *new wars* merupakan kombinasi antara negara dan nonnegara. Kedua, perbedaan tujuan. *Old wars* terjadi demi kepentingan geopolitik dan ideologi, sementara *new wars* terjadi atas nama identitas. Ketiga, perbedaan metode. *Old wars* terjadi dengan *decisive battles* dan sarana militer lainnya, sedangkan *new wars* sangat sedikit sekali terjadi *decisive battles* dan menggunakan sarana militer. Sebaliknya, dalam *new wars* penguasaan wilayah dilakukan dengan pendekatan politik dan pembersihan etnis

(*ethnic cleansing*). Keempat, perbedaan pendanaan (Kaldor, 1999). Peperangan dalam *old wars* didanai oleh negara, sedangkan dalam *new wars*, negara sangat sedikit mengeluarkan dana, di mana masing-masing pihak dalam *new wars* mendapatkan dana dari aktivitas penjarahan, kejahatan, hingga dukungan diaspora. *Finance in old wars relied on production, finance in new wars relies on predation.*

3. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan karena peneliti akan mengkaji hal yang sifatnya non matematik atau tidak terukur oleh angka. Permasalahan yang akan dikaji adalah masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Penelitian kualitatif cenderung terfokus pada segi kualitas (latar belakang, korelasi teori, hingga analisis) dibandingkan kuantitas (angka atau ukuran). Peneliti percaya bahwa kebenaran dalam suatu penelitian adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penjelasan mendalam terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka (Danim, 2002). Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif tersebut dapat didefinisikan sebagai penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berorientasi pada beberapa tinjauan pustaka dan kolaborasi teori dari beberapa sumber, seperti buku, jurnal, dan website.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Sejarah Konflik Rohingya

Narasi mengenai konflik Rohingya tentunya tidak asing lagi dalam fenomena konflik Hubungan Internasional. Beberapa faktor ditengarai menjadi sumber dari internasionalisasi isu serta konflik yang berkepanjangan. Mulai dari faktor agama yaitu Muslim versus Buddha, faktor suku budaya bahwa etnis Rohingya bukanlah bagian dari etnis asli Myanmar, hingga dikecangnya hak politik yang mengakibatkan pergerakan massal menjadi refugee bahkan tuduhan pembantaian mewarnai konflik Rohingya. Namun sebelum bisa memahami dengan jelas serta memaknai proses konflik berkepanjangan Rohingya, peneliti rasa perlu untuk menjabarkan satu persatu sejarah faktual dalam konflik Rohingya.

Gambar 1. Peta Geografis Konflik Rohingya



Sumber: aljazeera.com

a. Asal Muasal Etnis Rohingya

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa etnis Rohingya merupakan salah satu etnis minoritas yang ada di Myanmar. Namun hal apakah yang mendorong etnis Rohingya menjadi salah satu isu konflik berkepanjangan serta disoroti dalam Hubungan Internasional? Etnis Rohingya merupakan penduduk yang tinggal dalam sebagian besar wilayah Rakhine Utara di Myanmar. Secara geografis memang letak wilayah ini sangat berdekatan dengan Bangladesh dan Pakistan. Etnis Rohingya, secara morfologi maupun ciri-ciri fisik lebih dekat dengan etnis Bengali sehingga sangat berbeda dengan mayoritas masyarakat Myanmar. Hal ini juga didukung dengan sejarah bahwa mayoritas etnis Rohingya yang menetap di Myanmar merupakan para pedagang turun-temurun yang berasal dari wilayah Arab.

Percikan konflik serta ketegangan berdasarkan identitas rasial dalam etnis Rohingya ini awalnya tidak bereskalasi hingga terjadi sebuah konfrontasi di tahun 1947-1954. Pada periode ini di wilayah Rakhine, muncul gerakan pemberontakan yang diinisiasi oleh kelompok Muslim (*the North Arakan Muslim League*) bertujuan untuk memisahkan/memerdekakan diri dari pemerintah Myanmar. Kelompok pemberontak ini juga mulanya mengajak pemimpin Pakistan untuk mendukung gerakan mereka, namun ditolak. Pada periode ini, telah diyakini bahwa gagasan dari *the North Arakan Muslim League* mengakibatkan adanya migrasi ilegal besar-besaran dari wilayah Bengali ke Arakan/Rakhine Utara. Di momen inilah mulai muncul sentimen/konfrontasi identitas tentang status nativisme dari etnis Rohingya. Eskalasi kondisi ditandai dengan operasi militer oleh Myanmar pada tahun 1950-1954 untuk memberantas pemberontakan dari kelompok ini (*Thit Maung, Yebaw (1989). Civil Insurgency in Burma. Yangon: Ministry of Information. hlm. 30-31*).

Kendati telah dilakukan upaya untuk meredam pemberontakan, beberapa mantan pejuang dari kelompok tersebut masih berupaya mendirikan berbagai perlawanan separatisme, salah satunya *Rohingya Patriotic Front (RPF)*. Kelompok ini memiliki misi untuk membentuk wilayah/zona otonomi bagi masyarakat Muslim. Pergerakan kelompok ini kemudian menjadi massif dan bertransformasi sebagai *Rohingya Solidarity Organization (RSO)* serta berafiliasi dengan beberapa kelompok radikal muslim lainnya. Dengan tujuan membendung pergerakan serta dampak yang lebih buruk lagi, akhirnya di tahun 1982 pemerintah Myanmar di bawah pimpinan Perdana Menteri Ne Win, diperkenalkannya *Burmese Citizenship Law* dimana masyarakat Muslim selain orang-orang Kaman tidak diakui kewarganegaraannya, termasuk etnis Rohingya (*Jilani, A. F. K. (1999). The Rohingyas of Arakan: Their Quest for Justice*). Dari titik inilah etnis Rohingya merasa hak politik mereka telah dilucuti, terdiskriminasi hingga akhirnya muncul konflik-konflik persekusi.

b. Lemahnya Negara dalam Konflik Rohingya

Faktor perbedaan rasial serta sentimen terhadap identitas pribumi versus mendatang dari asal muasal etnis Rohingya setidaknya telah menyulut percikan-percikan konflik yang akhirnya mengalami konfrontasi. Namun pada dasarnya, negara diperlukan sebagai sebuah institusi yang mampu melindungi segenap warga negaranya, dan jika tidak seminimal mungkin dapat memberikan perlindungan pada hak asasi manusia (HAM). Lantas mengapa tidak demikian pada etnis Rohingya? Hal ini tentu perlu melibatkan penilaian dan indikator pada negara Myanmar itu sendiri, dimana pada konteks penjelasan masalah kali ini menurut peneliti, Myanmar merepresentasikan

lemahnya dan ketidakberdayaan negara sebagai institusi atau kekuatan berdaulat tertinggi di konflik ini. Pertama, lemahnya Myanmar sebagai negara ditunjukkan dengan tindakan represif, kecenderungan pemerintah untuk bertindak otoriter atau diktator serta keterlibatan militer dalam setiap masalah atau konflik. Keberadaan pemerintahan yang otoriter ini abai terhadap faktor-faktor kearifan lokal dan juga pendekatan berbasis humanis dalam menyelesaikan berbagai macam masalah. Sedangkan pada kenyataannya, ikut campurnya peran militer dalam konflik seringkali justru memperkeruh masalah dengan adanya tindakan kekerasan serta kondisi atau syarat-syarat yang *non-negotiable*.

Kedua, faktor ekonomi atau kemiskinan, hal ini merupakan salah satu dampak yang juga muncul akibat pemerintahan otoriter. Sejak kemerdekaannya, Myanmar melalui proses dan masa-masa sulit dimana perekonomian tidak kunjung berkembang pesat dalam negara ini. Kecenderungan pemerintahan yang tidak terbuka mengakibatkan sentralisasi ekonomi, tidak terdistribusinya *economic power* hingga kemungkinan isu korupsi yang bersirkulasi di orang-orang sekitar penguasa. Ketidakmampuan ekonomi untuk berkembang juga ditengarai karena tertutupnya Myanmar atau mengisolasi diri dari arena ekonomi internasional, hingga masa jabatan Thein Sein yang perlahan mulai terbuka. Namun perlu digaris bawahi bahwa ketimpangan ekonomi ini berkontribusi pada mudahnya gesekan atau konflik komunal dan sektarian terjadi - hingga sulit diselesaikan di Myanmar.

Ketiga, faktor diskriminasi etnis dan politik, dalam konteks ini politik identitas menjadi isu yang dapat diperluas oleh pemerintah Myanmar. Di satu sisi, negara Myanmar harus melindungi segenap masyarakatnya dari bahaya apapun yang mengancam persatuan serta kedaulatan teritorialnya. Namun di sisi lain, ketegangan serta narasi politik identitas bahwa secara ciri-ciri morfologi, fisik dan mayoritas keyakinan etnis Rohingya berbeda dengan masyarakat Myanmar, saling tarik-menarik dan menimbulkan gesekan konflik hingga pemberontakan. Sayangnya, pemerintah Myanmar di bawah pedoman otoriternya justru secara radikal menghapus hak-hak politik kewarganegaraan dari etnis Rohingya. Hal ini kemudian menjadikan bentuk-bentuk kekerasan, persekusi, perampasan materi, hingga tindakan semena-mena seolah-olah dilegitimasi oleh negara untuk menumpaskan etnis Rohingya. Setidaknya tercatat beberapa tindakan penindasan terhadap etnis Rohingya berupa perampasan tanah, pembakaran rumah, pembakaran tempat ibadah (masjid), pemerkosaan, pengusiran, penutupan jalur distribusi makanan, hingga pembantaian. Ironisnya lagi, para biksu di Rakhine juga ditengarai berkontribusi terhadap penyebaran narasi serta sentimen negatif terhadap etnis Rohingya (Revolusi, Alfi. (2012). *Causative Factors: Rakhine and Rohingya Ethnic Conflict in Myanmar in 2012*, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa UNEJ 2013).

4.2 Pihak Terlibat dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya

Beberapa tahun terakhir tepatnya 2012 terjadi konflik di *Central Rakhine* yang menyebabkan 140.000 orang kebanyakan etnis Rohingya mengungsi. Selama lebih dari lima tahun 120.000 orang dapat dikembalikan namun dengan tempat tinggal yang kurang layak dan akses kesehatan yang terbatas (*European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations Report, Rohingya Crisis, 2018*). Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya keseriusan dalam mengantisipasi maupun menyelesaikan konflik etnis Rohingya dengan baik. Bahkan dalam satu kesempatan tindakan diskriminasi terhadap warga Rohingya juga ditunjukkan oleh Aung San Suu Kyi padahal beliau dipercaya sebagai agen perubahan dalam isu hak asasi manusia (HAM). Surat rahasia Myanmar yang disampaikan Aung San

Suu Kyi saat bertemu pelapor khusus PBB bocor ke publik. Sebagaimana diberitakan *Reuters*, Suu Kyi dalam pernyataannya kepada pelapor khusus PBB mengatakan pemerintahnya tidak akan menggunakan kata “Rohingya” dan menggantinya dengan “masyarakat penganut Islam di Rakhine”. Hal ini jelas menunjukkan tidak inginnya negara - bahkan Suu Kyi - mengakui keberadaan etnis Rohingya.

Sejak keberadaan serta hak-hak politiknya dihapuskan oleh Myanmar, etnis Rohingya hidup dalam ketidakpastian karena mereka seolah-olah tidak memiliki tempat tinggal di negaranya sendiri. Disusul dengan berbagai tindakan persekusi dari militer serta konflik komunal di level akar rumput, sebagian besar etnis Rohingya dipaksa untuk tinggal di kamp-kamp pengungsian dengan akses yang sangat terbatas dalam hal apapun. Mereka dipaksa untuk tetap berada di kamp tanpa ada hak untuk belajar, hak untuk bekerja, serta hak-hak esensial lainnya. Hal ini kemudian memicu etnis Rohingya untuk melarikan diri - memilih opsi menjadi pencari suaka ke negara-negara lainnya. Migrasi serta mobilitas etnis Rohingya ini semakin disoroti oleh negara-negara dan komunitas internasional. Selain mengalami kekerasan di Myanmar, etnis Rohingya seringkali juga tidak diterima dengan ramah hingga mengalami nasib terlunta-lunta di negara transit ataupun tujuan suaka. Setidaknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seringkali bersuara aktif untuk mendorong penyelesaian konflik Rohingya. Sedangkan di sisi lain, ASEAN sebagai salah satu organisasi tempat bernaungnya Myanmar, seringkali didorong untuk memberikan peran lebih dalam penuntasan konflik Rohingya.

a. PBB dalam Konflik Rohingya

Etnis Rohingya ditengarai menjadi salah satu dari 7 komunitas di dunia yang dirujuk sebagai *stateless people*. Hanya sekitar 5,4% dari total populasi etnis Rohingya yang berhasil mendapatkan status sebagai *refugee* dari PBB. Lebih dari seratus ribu orang yang mencoba melarikan diri dari Myanmar sebagai pencari suaka, namun ratusan diantaranya meninggal dalam perjalanan karena kekurangan makanan, malnutrisi, dehidrasi, hingga kelebihan muatan dalam kapal yang mengakibatkan tenggelam di tengah lautan. Kompleksitas isu yang dialami oleh orang-orang Rohingya ini meningkatkan alarm kesadaran bahwa hal ini merupakan krisis kemanusiaan yang perlu dijadikan prioritas (Mahmood, 2017).

Pada tahun 2009, juru bicara PBB mendeskripsikan etnis Rohingya sebagai “most friendless people in the world”. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa pembatasan mobilitas mereka menjadikan etnis Rohingya semakin stress dan juga tertekan, dibarengi dengan tindakan opresif yang masih mereka terima dari pemerintah Myanmar. PBB juga membentuk tim investigasi untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Myanmar sepanjang waktu. PBB terus menyuarakan bahwa negara-negara tetangga Myanmar untuk tetap terbuka terhadap kemungkinan datangnya orang-orang Rohingya melalui kapal dalam upayanya mencari suaka. Di kesempatan lain juga PBB menyerukan perlunya pembentukan komite atau *task force* di tingkat regional yang diharapkan membantu penyelesaian konflik Rohingya (Ponniah, 2017).

Eskalasi konflik Rohingya kemudian sempat memanas di tahun 2016, dimana *Human Right Watch (HRW)* juga melaporkan kepada PBB bahwa ada kemungkinan terjadinya serangan dan tindakan destruktif terhadap etnis Rohingya yang ditunjukkan oleh citra satelit (Laccino, 2016). HRW mendesak dan menyerukan PBB untuk melakukan investigasi terhadap kondisi ini, serta mengecam tindakan pemerintah militer yang semakin semena-mena terhadap etnis Rohingya.

Dalam investigasi nya, PBB mengemukakan bahwa para pemimpin di Myanmar seharusnya mendapatkan tindakan investigasi serta dihukum karena menjadi bagian dari

genosida - penumpasan etnis secara spesifik dan tindakan terstruktur. Dalam laporan setebal 400 halaman ini, Dewan HAM PBB mengklaim telah melakukan pemeriksaan lebih dari 800 saksi dan mendapatkan bukti-bukti atas tindakan kekerasan serta kekejaman pemimpin Myanmar. Dewan HAM PBB juga mengajukan tuntutan tersebut untuk ditindaklanjuti oleh Dewan Keamanan PBB (VOX, 2018).

b. Peran ASEAN dalam Dinamika isu Rohingya

ASEAN adalah organisasi regional yang paling dekat dengan Myanmar, serta dinilai memiliki kredibilitas dalam meredam konflik domestik dengan damai melalui *ASEAN Way*. Namun di sisi lain, ASEAN juga dikritik karena tidak pernah - dan tak kunjung memberikan solusi atau rekomendasi konkrit terhadap konflik etnis Rohingya. Hal ini menuai pertanyaan dan reaksi masyarakat internasional, apakah ASEAN benar-benar abai terhadap penegakan HAM meskipun isu tersebut menyangkut isu domestik negara Myanmar? Atau ASEAN sebenarnya tidak cukup percaya diri bahwa konflik etnis Rohingya di Myanmar dapat diselesaikan tanpa berkontribusi pada instabilitas kawasan?

Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi kedaulatan negara, ASEAN bisa dikatakan tidak menggebu-gebu dalam menghadapi konflik Rohingya. ASEAN memberikan ruang kepercayaan bagi Myanmar untuk menyelesaikan isu internal, meskipun hal ini menuai kecaman dan penyudutan dari berbagai pihak internasional. Ketiadaan pernyataan ASEAN secara formal terhadap konflik Rohingya menimbulkan asumsi bahwa ketidakseriusan menangani kesulitan etnis Rohingya dapat berakibat buruk bagi kawasan itu sendiri dalam jangka panjang.

Dalam beberapa kesempatan, masyarakat internasional juga meminta ASEAN untuk dapat meneruskan seruan reformasi politik bagi pemerintah Myanmar. Rekomendasi ini dinilai mampu memperbaiki situasi kondisi domestik yang perlahan-lahan dapat mengarah pada de-eskalasi serta rekonsiliasi konflik. Meskipun secara kontradiktif, rekomendasi ini tidak ditunjukkan pada masa Aung San Suu Kyi yang diharapkan menjadi agen demokrasi di Myanmar (VOX, 2018). Kendati tidak secara terbuka mencampuri urusan domestik Myanmar, negara-negara ASEAN tetap memberikan penampungan sementara bagi para pencari suaka dari Rohingya. Selain itu secara spesifik Indonesia berupaya membuka dialog *1on1* dengan Myanmar dan memberikan beberapa rekomendasi seperti pengembalian stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di negara bagian Rakhine, tanpa memandang suku dan agama dan pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan (BBC Indonesia, 2017).

4.3 Internasionalisasi Isu dalam Konflik Rohingya

Junta Militer Myanmar saat ini telah berhenti untuk melakukan persekusi terhadap etnis Rohingya, namun pemerintah Myanmar menolak para pengungsi yang telah berada di luar Myanmar untuk kembali ke negaranya. (Paul, 2018). PBB saat ini juga sedang berupaya menekan Myanmar dan Bangladesh agar menandatangani perjanjian untuk menampung kembali pengungsi etnis Rohingya di berbagai negara dikarenakan PBB masih menilai bahwa *Rakhine State* dianggap tidak aman bagi para pengungsi untuk kemali. Dalam konflik Rohingya, beberapa actor Negara yang turut terlibat dalam konflik antara lain India dan China yang memiliki kepentingan ekonomi terhadap Myanmar. Hal tersebut membuat potensi eskalasi konflik yang terjadi cenderung rawan dipengaruhi oleh kepentingan nasional kedua negara tersebut. PBB melalui *United Nation High*

Commissioner for Refugees (UNHCR), *World Food Program (WFP)* dan *World Health Organization (WHO)*, telah menginisiasi program bantuan untuk pengungsi Rohingya sejak Tahun 1978 dan telah berhasil memulangkan sebanyak 230.000 Jiwa Etnis Rohingya pada tahun 1993 hingga 1997. (Bepler, 2018). Saat ini *The UN Intersector Coordination Group (ISCG)* bersama 45 NGO Internasional telah memberikan bantuan senilai 434 Juta USD sementara untuk Maret hingga Desember 2018 dibutuhkan lebih dari 950 Juta USD untuk kebutuhan kamp pengungsian di Bangladesh.

Pemerintah Bangladesh telah melaporkan terdapat 1.118.426 pengungsi Rohingya pada 5 Juni 2018 dan lebih dari 620.000 pengungsi berada di daerah Kutupalong. (Bepler, 2018) Sejak 1997, Amerika dan PBB telah memberikan sanksi kepada Myanmar dengan pelarangan perdagangan dan investasi. Namun pada tahun 2012, sanksi tersebut telah dianulir kecuali pada sektor perdagangan senjata dan hingga saat ini konflik masih terus berlanjut tanpa adanya pembahasan tentang sanksi yang akan diberikan Kembali kepada Myanmar. Jerman hingga saat ini telah memberikan 60 juta Euro kepada *EU Humanitarian Aid Activities* dan terdapat beberapa program bantuan ke Rakhine. Keberlangsungan konflik di Rakhine menjadi fokus beberapa negara seperti halnya China yang memiliki kepentingan ekonomi untuk pembangunan *One Belt One Road*, India dengan program *Kaladan Multi Modal Transit Transport Project*. Oleh karena itu, kondusifitas di Rakhine menjadi salah satu fokus utama China karena akan memberikan dampak yang signifikan terhadap proyek strategis China. Sementara itu beberapa perusahaan yang berasal dari Eropa dan Asia juga telah melakukan eksplorasi ke Rakhine termasuk eksplorasi Minerba dan Uranium. Rakhine merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi namun memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah sehingga menarik banyak aktor-aktor internasional untuk membuka peluang bisnis (Wolf, 2018).

4.4 Analisis Konflik Rohingya dalam Perspektif *New war*

Dalam perspektif *New war* atau biasa juga disebut *Modern War*, konflik Rohingya cenderung dapat memenuhi beberapa aspek dalam aspek, antara lain:

a. Aktor dalam konflik Rohingnya

Salah satu faktor yang dapat digunakan untuk mendefinisikan konflik Rohingnya sebagai *New war* adalah banyaknya aktor yang terlibat dalam konflik tersebut baik *state actor* maupun *non-state actor*. Beberapa aktor yang terlibat antara lain:

1) Junta Militer Myanmar

Junta militer merupakan salah satu kekuatan ekonomi dan politik terbesar di masyarakat Myanmar dimana hal tersebut juga didukung oleh hukum konstitusi Myanmar. Hal tersebut membuat junta militer memiliki otoritas secara hukum untuk mengambil atau melakukan ekspansi terhadap lahan masyarakat atas dasar pengembangan untuk kegunaan markas militer, eksploitasi sumber daya alam, pengembangan sector pertanian, maupun pembangunan infrastruktur untuk menunjang kegiatan pariwisata (Khaled, Mahmud, & Fariba, 2019). Hal tersebut menunjukkan konflik yang terjadi melibatkan antara *state actor* yang direpresentasikan oleh Junta Militer dan *non-state actor* yang direpresentasikan oleh Rohingnya.

2) Arakan Rohingnya *Salvation Army (ARSA)*

ARSA memiliki tujuan untuk melindungi suku Rohingnya dari persekusi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Pada tahun 2017, ARSA telah melakukan pembunuhan terhadap 12 orang personel pengamanan dari pemerintah Myanmar sebagai bentuk perlawanan terhadap operasi pengamanan yang sedang berlangsung.

3) ASEAN

ASEAN memiliki peran penting sebagai organisasi regional yang berfungsi untuk membuat berbagai kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas lingkungan regional dari berbagai krisis yang terjadi.

4) Pemerintah Bangladesh

Bangladesh sebagai negara yang banyak menerima pengungsi dari Rohingya meskipun Bangladesh tidak memiliki aturan hukum yang spesifik terkait perlindungan pengungsi asing dalam skala nasional.

5) Pemerintah India

Pemerintah India cenderung mendukung Junta Militer Myanmar dikarenakan India memiliki beberapa kepentingan ekonomi dengan Myanmar termasuk pembangunan proyek strategis sehingga pilihan untuk mendukung militer Myanmar dinilai dapat memberikan keuntungan yang signifikan terhadap beberapa proyek pembangunan strategis India. (Khaled, Mahmud, & Fariba, 2019)

6) Pemerintah China

Pemerintah China memiliki investasi yang cukup signifikan di Myanmar sehingga tingginya potensi konflik dikhawatirkan konflik yang tidak terkendali di Myanmar dapat memengaruhi Investasi yang dilakukan oleh China.

7) PBB

Sebagai organisasi skala global, PBB dinilai dapat memberikan tekanan maupun dorongan kepada Myanmar terkait penyelesaian konflik Rohingya. Banyaknya aktor yang terlibat dalam konflik Rohingya, menunjukkan adanya konflik yang terjadi dengan kepentingan masing-masing. Hal tersebut menunjukkan bahwa konflik Rohingya merupakan salah satu contoh perang modern.

b. Perbedaan tujuan

Pada konflik Rohingya salah satu isu yang sering terangkat di media adalah terkait upaya pemusnahan atau persekusi suku Rohingya. Salah satu faktor yang menjadi katalis dalam konflik tersebut adalah permasalahan terkait identitas dimana etnis Rohingya menjadi target persekusi oleh Pemerintah Myanmar. (Khaled, Mahmud, & Fariba, 2019).

c. Perbedaan Metode

Dalam konflik Rohingya, metode yang digunakan pemerintah Myanmar cenderung melakukan persekusi pada etnis Rohingya dengan terus memberikan tekanan sehingga diharapkan etnis Rohingya akan meninggalkan *Rakhine State*. Selain itu, tekanan-tekanan yang dibuat merupakan salah satu metode untuk menekan seluruh aktivitas keagamaan yang sifatnya minoritas di Myanmar. (Sasen, 2017)

d. Pendanaan

Dalam konflik Rohingya, pemerintah Myanmar terus berupaya menyingkirkan etnis Rohingya dengan cara terus melakukan persekusi. Dalam pandangan *New war*, saat ini menunjukkan bahwa pemerintah Myanmar berupaya mengambil paksa daerah *Rakhine State* yang notabene dihuni oleh etnis Rohingya.

5. Kesimpulan

Dalam konteks peradaban manusia, perang dan konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan peradaban itu sendiri. Plato bahkan menegaskan bahwa ketika semua orang binasa, perang dan konflik akan berakhir. Berakhirnya Perang Dingin membawa perubahan dalam tatanan internasional. Setelah berakhirnya Perang Dingin, lingkungan strategis baru untuk mengembangkan kemampuan perang yang tidak konvensional telah berubah. Semua harapan ini tidak akan pernah menjadi suatu kenyataan yang faktual. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai konflik etnis muncul di dunia, yang melibatkan berbagai kepentingan politik dan ekonomi. Sistem internasional saat ini sedang mengalami perubahan besar. Transformasi ini terbentuk setelah Perang Dingin. Sementara, Globalisasi telah mempengaruhi munculnya perang-perang baru yang membawa kemajuan di bidang informasi, teknologi, dan komunikasi. Mary Kaldor memperkenalkan konsep perang baru yang logikanya berbeda dengan perang lama. Para peserta perang lama (perang konvensional) terdiri dari angkatan bersenjata reguler suatu negara. Perang baru seringkali lebih ganas dan menakutkan daripada perang gaya lama, dan perang gaya lama yang biasanya membatasi perang konvensional antar negara telah dibatalkan.

Strategi perang telah diubah menjadi strategi perang baru dalam mengejar penargetan yang disengaja dan pemindahan paksa warga sipil. Perubahan esensi perang, di satu sisi memang kondusif bagi perkembangan politik suatu negara atau wilayah, tetapi di sisi lain eskalasi konflik yang sifatnya terlokalisir ternyata mengarah kepada kekelan dari perang itu sendiri. Konflik bernuansa etnis pada dasarnya merupakan isu rasial yang berlatar belakang kehidupan politik, yang telah dianggap sebagai masa lalu. Etnis Rohingya telah menghadapi diskriminasi sistematis dan pengucilan sejak tahun 1962, Etnis Rohingya merupakan kelompok Muslim terbesar di Myanmar yang berjumlah sekitar satu juta atau sekitar empat persen dari total penduduknya. Etnis Rohingnya telah mengalami marginalisasi sejak lama, mereka ditolak menjadi kewarganegaraan Myanmar dan tidak diakui sebagai kelompok etnis. Beberapa tahun terakhir tepatnya 2012 terjadi konflik di Central Rakhine yang menyebabkan 140.000 orang kebanyakan etnis Rohingya mengungsi. Pemerintah Myanmar tidak mengakui kewarganegaraan Rohingya yang telah tinggal beberapa generasi di negara itu.

Tulisan ini menjelaskan bagaimana pembaca memahami bentuk perang baru yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan disertai dengan studi kasus konflik yang dialami oleh etnis Rohingya. Sejarah Konflik Rohingya berawal dari sebuah narasi yang tentunya tidak asing lagi dalam fenomena konflik Hubungan Internasional. Asal Muasal Etnis Rohingya dalam beberapa literatur disebutkan bahwa etnis Rohingya merupakan salah satu etnis minoritas yang ada di Myanmar. Berangkat dari gambaran konflik ini memperlihatkan lemahnya peran Negara dalam Konflik Rohingya. Semua itu tergambar dari faktor perbedaan rasial serta sentimen terhadap identitas pribumi versus pendatang dari asal muasal etnis Rohingya yang setidaknya telah menyulut percikan-percikan konflik dan berakhir dengan konfrontasi. Adapun beberapa faktor penyebab konflik Rohingya, yaitu: (1) Lemahnya Myanmar sebagai negara ditunjukkan dengan tindakan represif, kecenderungan pemerintah untuk bertindak otoriter atau diktator serta keterlibatan militer dalam setiap masalah atau konflik; (2) Faktor ekonomi atau kemiskinan, hal ini merupakan salah satu dampak yang juga muncul akibat pemerintahan otoriter; dan (3) Faktor diskriminasi etnis dan politik, dalam konteks ini politik identitas menjadi isu yang dapat diperluas oleh pemerintah Myanmar.

Beberapa tahun terakhir tepatnya di tahun 2012 terjadi konflik di Central Rakhine yang menyebabkan 140.000 orang kebanyakan etnis Rohingya mengungsi. Hal tersebut

mengundang respon internasional, diantaranya terlihat dengan kehadiran aktor-aktor lain yang terlibat dalam Upaya Penyelesaian Konflik di Rohingya. Salah satunya adalah PBB. Etnis Rohingya ditengarai menjadi salah satu dari 7 komunitas di dunia yang dirujuk sebagai *stateless people*. Hanya sekitar 5,4% dari total populasi etnis Rohingya yang berhasil mendapatkan status sebagai *refugee* dari PBB. Selain itu juga, ada ASEAN sebagai sebuah organisasi regional yang bernaung di kawasan tersebut. ASEAN adalah organisasi regional yang paling dekat dengan Myanmar, serta dinilai memiliki kredibilitas dalam meredam konflik domestik dengan damai melalui *ASEAN Way*. Dengan demikian, berbagai upaya internasionalisasi isu dalam konflik Rohingya dilakukan agar mendapat perhatian internasional. Hal itu setidaknya sedikit membuahkan hasil dimana Junta Militer Myanmar saat ini telah berhenti untuk melakukan persekusi terhadap etnis Rohingya, namun pemerintah Myanmar tetap menolak para pengungsi yang telah berada di luar Myanmar untuk kembali ke negaranya.

Sebagaimana studi kasus yang ada, konflik Rohingnya cenderung dapat memenuhi beberapa aspek dalam aspek dalam perspektif *Modern War / New war*, antara lain: Aktor dalam konflik Rohingnya. Dimana faktor yang dapat digunakan untuk mendefinisikan konflik Rohingnya sebagai *New war* adalah banyaknya aktor yang terlibat dalam konflik tersebut baik *state actor* maupun *non-state actor*. Beberapa aktor yang terlibat antara lain: (1) Junta Militer Myanmar; (2) Arakan Rohingnya *Salvation Army* (ARSA); (3) ASEAN; (4) Pemerintah Bangladesh; (5) Pemerintah India; (6) Pemerintah China; dan (7) PBB. Kemudian adalah Perbedaan tujuan dimana konflik Rohingnya menasar salah satu isu yang sering terangkat di media adalah terkait upaya pemusnahan atau persekusi suku Rohingnya. Selain itu juga terdapat Perbedaan Metode dimana dalam konflik Rohingnya, metode yang digunakan pemerintah Myanmar cenderung melakukan persekusi pada etnis Rohingnya dengan terus memberikan tekanan sehingga diharapkan etnis Rohingnya akan meninggalkan Rakhine State. Dan yang terakhir adalah terkait dengan pendanaan dimana pada konflik Rohingnya, pemerintah Myanmar terus berupaya menyingkirkan etnis Rohingnya dengan cara terus melakukan persekusi.

Daftar Pustaka

Buku

- Bepler, S. (2018). *The Rohingya Conflict: Genesis, Current Situation, and Geopolitical Aspects*. Pacific Geographies.
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kaldor, Mary. (1999). *New and Old wars: Organized Violence in a Global Era*. Stanford University Press.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Khaled, A. F., Mahmud, T., & Fariba, N. I. (2019). *A Conflict Profile: The Rohingya Conflict in Myanmar*. Journal of Social Science Research, Vol 14.
- Mahmood, S. S. (2016). *The Rohingya people of Myanmar: health, human rights, and identity*. The Lancet Journal Vol. 389.

Website

- Armandhanu, D. (2017). *Aung San Suu Kyi Haramkan Kata 'Rohingya' saat Bertemu PBB*. Diakses dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160622171132-106-140164/aung-san-suu-kyi-haramkan-kata-rohingya-saat-bertemu-pbb/>.
- BBC Indonesia. (2017). *Siapa sebenarnya etnis Rohingya dan enam hal lain yang harus Anda ketahui*. Diakses dari BBC Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41149698>.
- DW Indonesia. (2017). *Rohingya di Myanmar: Apa yang Perlu Diketahui?*. Diakses dari DW Indonesia: <http://www.dw.com/id/rohingya-di-myanmar-apa-yang-perlu-diketahui/g-40343623>.
- Kirby, J. (2018). *New UN report documents evidence of mass atrocities in Myanmar against The Rohingya*. Diakses dari VOX: <https://www.vox.com/world/2018/9/18/17873638/rohingya-united-nations-myanmar-war-crimes>.
- Laccino, L. (2016). *New wave of destruction sees 1,250 houses destroyed in Myanmar's Rohingya villages*. Diakses dari International Business Times: <https://www.ibtimes.co.uk/new-wave-destruction-sees-1250-houses-destroyed-myanmars-rohingya-villages-1592582>.
- Paul, R. (2018). *Bangladesh, Myanmar Agree to Begin Rohingya Repatriation by Mid-November*. Diakses dari Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya/bangladesh-myanmar-agree-to-begin-rohingya-repatriation-by-mid-november-idUSKCN1N414Q>.
- Ponniah, K. (2017). *Who will help Myanmar's Rohingya?*. Diakses dari BBC News:

<https://www.bbc.com/news/world-asia-38168917>.

- Sasen, S. (2017). *Is Rohingya Persecution Caused by Business Interests Rather than Religion?*. Diakses dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/globaldevelopment-professionals-network/2017/jan/04/is-rohingya-persecution-caused-by-business-interestsrather-than-religion>.
- Wolf, S. O. (2018). *Myanmar's Rohingya conflict more economic than religious interview from Shamil Shams with Siegfried O.* Diakses dari DW: <https://p.dw.com/p/1Fbhu>.